Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH

Seorang Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sejak 1 September 2006. Selain itu juga dikenal sebagai seseorang yang concern dalam masalah Hak Asasi Manusia dimana sampai saat ini aktif di Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia FHUI sebagai instruktur maupun sebagai pembuat modul. Selain itu juga dikenal sebagai seorang yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih aktif di Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI). Dalam kepakarannya sering diminta sebagai saksi ahli baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi, maupun di Pengadilan Umum. Sebagai ahli dalam pembentukan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, Penanggap/Pemberi Komentar Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Anna, begitu panggilan akrabnya lahir di Jakarta, pada 27 April 1958. Menyelesaikan program sarjananya di FHUI pada tahun 1984, kemudian melanjutkan pada program pasca sarjana untuk mendapatkan gelar S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia selesai pada tahun 1998, dan kemudian memperoleh gelar S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang selesai pada tahun 2004.

Karya ilmiahnya tersebar di berbagai seminar, jurnal, maupun buku-buku, antara lain dalam buku-buku karyanya : Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Teaching Material mata kuliah Hukum Acara PTUN, Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998, Hukum Administrasi Negara, Administrative Court and Legal Reform Since 1998 in Indonesia, in Reforming Laws and Institutions in Indonesia: An Assessment. Edited by Naoyuki Sakumoto and Hikmahanto Juwana. Copyright in 2007 by: Institute of Developing Economies- Japan External Trade Organization 3-2-2 mihama-Ku, Wakaba-Cho, Chiba-Shi, Japan, 261-8545. Printed by Faculty of Law University of Indonesia Press.

Ataupun dalam artikel-artikel ilmiahnya misalnya dalam Upaya Administratif pada Majelis Pertimbangan Pajak dalam Kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara, Masalah Juridis Pelaksanaan BIPIK dalam Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pelaksanaan Keringanan Beban Serta Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai Kemampuan Wajib Pajak, Keberadaan Badan Peradilan Pajak, Suatu Tinjauan Juridis Konstitusional, Judicial Control Terhadap Kewenangan Administrasi Negara, Tinjauan Aspek Liability dan Remedy, Pengembangan Sumber Pajak-Pajak Daerah, dalam Majalah Hukum Dan Pembangunan, Implikasi Hukum Bagi Pejabat Publik Yang Melakukan Maladministrasi, Larangan

Melampaui Wewenang Pada Penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1987-1998, Keputusan Administrasi Negara (Beschikking), Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Berbagai Permasalahannya, Upaya Administratif Law Review, Universitas Pelita Harapan, Penegakan Rasa Aman Melalui Intervensi Kemanusiaan", Indonesian Journal of International Law, "Hukum Administrasi Negara": Awal memahami Objek Sengketa Peradilana Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan.